

**PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA
KOTA CILEGON**



**LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS
INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA
KOTA CILEGON
TAHUN 2025**

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon disusun melalui pengukuran indikator Kinerja Tahun 2025, capaian kinerja diukur dengan membandingkan Capaian Kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, di antaranya :

- Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025;
- Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024;
- Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja sampai dengan Tanggal 31 Desember Tahun 2025, Serapan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mencapai **95,76 %**. Untuk Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalisme aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	62 (Poin)	70,35 (Poin)	113,46%
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	72,75 (Poin)	83,40 (Poin)	114,63
		Indeks Kepuasan Masyarakat	72 (Poin)	88,36 (Poin)	122,7
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	5 %	-22,60%	- 452%
2.	Meningkatnya Kesempatan kerja masyarakat	Tingkat penempatan tenaga kerja	30%	48,31%	161,03%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Pada uraian tabel di atas, terdapat indikator yang Realisasi Capaian Kinerja melebihi target di antaranya, **Indeks RB Perangkat Daerah, Nilai Lakip Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Tingkat Penempatan Tenaga Kerja**. Hal tersebut dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari Seluruh Internal Pegawai Dinas Tenaga Kerja untuk senantiasa berupaya

melakukan perbaikan kinerja dan menindak lanjuti Hasil Evaluasi tahun sebelumnya. Berikut ini Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,08%	7,41%	121,88%
2	Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten / kota	40,23%	48,31%	120,08%
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	20%	11,10%	55,50%
3	Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	86	70,35	81,80%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terdapat indikator yang tidak mencapai target di antaranya **Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)**. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari penyerapan tenaga kerja, keterbatasan lapangan kerja, ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri, perlambatan ekonomi, serta faktor sosial lainnya. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon berkomitmen akan terus berupaya melakukan berbagai langkah perbaikan pada tahun mendatang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029, demi tercapainya Agenda Pembangunan Kota Cilegon untuk **“Mewujudkan Cilegon Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**.

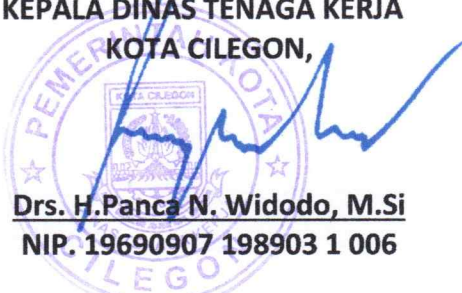
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon merupakan Perwujudan Pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan Tahun ke-V Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021-2026 dan Tahun ke-I Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi pada lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025.

Secara umum, Realisasi Capaian Kinerja Sasaran pada indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021-2026 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi untuk Realisasi Capaian Kinerja Sasaran pada Indikator Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029, terdapat indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadi evaluasi bagi Internal Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk melakukan perbaikan kinerja pada tahun mendatang, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kota Cilegon yang bermuara pada pencapaian Visi Kota Cilegon *"Mewujudkan Cilegon Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan"*.

Cilegon, 26 Januari 2026
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA CILEGON,


Drs. H. Panca N. Widodo, M.Si
NIP. 19690907 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah	4
1.4 Landasan Hukum	4
1.5 Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Indikator Kinerja Utama	12
2.3 Rencana Kerja Tahun 2025	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2 Realisasi Anggaran	54
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
BAB IV PENUTUP.....	60
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (Renstra Tahun 2021-2026)	10
Tabel. 2.1.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (Renstra Tahun 2021-2026)	11
Tabel. 2.2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Renstra (2021-2026)	13
Tabel. 2.2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Renstra (2025-2029)	14
Tabel. 2.3.1	Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 (Renstra 2021-2026).....	15
Tabel. 2.3.2	Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	16
Tabel. 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025.....	17
Tabel. 2.5.1	Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025.....	18
Tabel. 2.5.2	Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 (Perubahan).....	20
Tabel. 3.1.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	23
Tabel. 3.1.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026).....	24
Tabel. 3.1.3	Capaian Nilai Lakip Per Komponen Manajemen Kinerja Tahun 2025.....	25
Tabel. 3.1.4	Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Reformasi Tahun 2025	26
Tabel. 3.1.5	Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penggunaan TKA Tahun 2024 dan 2025.....	27
Tabel. 3.1.6	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029).....	29
Tabel. 3.6	Jumlah Pencari Kerja dan Penempatan Tahun 2025.....	31
Tabel. 3.7	Data Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan.....	32
Tabel. 3.8	Data Pemagangan Tahun 2025	33
Tabel. 3.9.1	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025 (Renstra Tahun 2021-2026).....	34
Tabel. 3.9.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025 (Renstra Tahun 2025-2029).....	35
Tabel. 3.10.1	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis (Renstra Tahun 2021-2026).....	37
Tabel. 3.10.2	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis (Renstra Tahun 2021-2026).....	38
Tabel. 3.11.1	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional (Renstra Tahun 2021-2026).....	39
Tabel. 3.11.2	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional (Renstra Tahun 2025-2029).....	39
Tabel. 3.12.1	Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026).....	41
Tabel. 3.12.2	Analisis Keberhasilan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025- 2029).....	43
Tabel. 3.13	Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	45
Tabel. 3.14	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	55
Tabel. 3.15.1	Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021- 2026).....	57
Tabel. 3.15.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025- 2029).....	57
Tabel. 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
-------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pengukuran serta pelaporan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya perencanaan kinerja yang terarah, pengukuran kinerja yang objektif, serta pelaporan kinerja yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian hasil atas pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sebagai Perangkat Daerah yang memiliki mandat dalam Urusan Ketenagakerjaan, bertanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah, khususnya pada aspek peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan hubungan industrial yang harmonis, serta perlindungan tenaga kerja. Dinamika ketenagakerjaan di Kota Cilegon ditandai oleh pertumbuhan industri, mobilitas tenaga kerja, serta tantangan kompetensi sumber daya manusia menuntut adanya pengelolaan kinerja yang terencana, terukur, akuntabel dan adaptif.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan selama tahun anggaran, sekaligus sebagai media evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, termasuk Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025.

Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon berupaya memberikan gambaran secara transparan dan akuntabel mengenai Realisasi Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan, analisis capaian indikator kinerja, faktor pendukung dan penghambat, serta langkah perbaikan yang akan ditempuh ke depan. Dengan demikian, LKjIP Tahun 2025 tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), tetapi menjadi

instrumen penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja pada tahun mendatang.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan kerja antarunit di Lingkungan Perangkat Daerah. Struktur ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, setiap unit kerja memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi, sehingga memudahkan dalam hal koordinasi, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Struktur organisasi juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, serta pengembangan sumber daya manusia di Lingkungan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Daerah, Kepala Dinas Mempunyai Tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di Bidang Ketenagakerjaan. Berdasarkan aturan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Penempatan Tenaga Kerja;
4. Hubungan Industrial;
5. Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Wali Kota Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya.

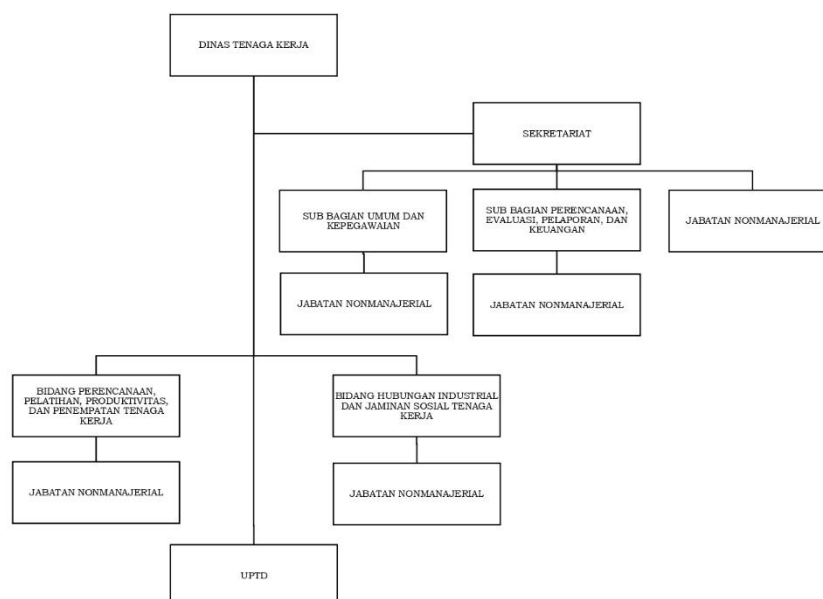
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Tenaga Kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Susunan Organisasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon meliputi :

- a. Sekertariat dengan membawahi Jabatan Manajerial Tingkat dasar dan Jabatan Non Manajerial, yaitu Sub Bagian Umum Kepegawaian membawahkan Jabatan Non Manjerial, serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan membawahkan Jabatan Non Manajerial;
- b. Bidang Perencanaan, Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, dengan membawahi Jabatan Non Manajerial yang terdiri dari Fungsional Pengantar Kerja;
- c. Bidang Hubungan Industrial, dengan membawahi Jabatan Non Manjerial yang terdiri dari Fungsional Mediator;
- d. UPTD Latihan Kerja dengan membawahi Jabatan Manajerial Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Non Manajerial yang teridiri dari Fungsional Instruktur;

Berikut ini gambaran Struktur Organisasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon berdasarkan uraian tugas yang tercantum pada Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Daerah (halaman 25-27) sebagai berikut :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi



1.3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon merupakan kondisi, permasalahan, atau tantangan utama yang secara signifikan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Cilegon. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan Perangkat Daerah
3. Telaah Isu KLHS Yang Relevan dengan Perangkat Daerah; dan
4. Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Perangkat Daerah Baik Global, Nasional, maupun Regional.

Yang menjadi fokus pada pemecahan Isu Strategis Perangkat Daerah yakni Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter. Hal ini selaras dengan Janji Politik Wali Kota Terpilih Periode 2025-2029 untuk urusan Ketenagakerjaan, salah satunya *“Modernisasi BLK Berstandar Nasional untuk Masyarakat dan Kemitraan dengan Industri dalam Upaya Pengentasan Pengangguran”*.

1.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 6. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
 7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Daerah (hal 25-27);
 9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai 2029;
 10. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 060/Kep.044/Sekrt Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025;

1.5 Sistematika Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon disusun dengan sistematika yang jelas untuk memudahkan pembaca dalam memahami capaian kinerja, kendala, dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Sistematika pelaporan ini disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penyusunan LAKIP.

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab Ini Meliputi **Capaian Kinerja Organisasi** (Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional /jika ada, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja) dan **Realisasi Anggaran** (diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja).

PENUTUP

BAB IV

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dengan *stakeholder*. Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan Dokumen Perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dimuat Program dan Kegiatan prioritas yang diusulkan, untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi dan Misi Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Visi dan Misi Kota Cilegon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2025-2029 merupakan VISI dan Misi Agenda Pembangunan Pemerintah Kota Cilegon Terpilih pada Periode 2025-2029. Mengingat Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih merupakan hasil proses politik, dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2025-2029. Adapun Visi Kota Cilegon Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN CILEGON MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Upaya untuk mewujudkan Visi Kota Cilegon Tahun 2025-2029, dijabarkan dalam 6 (enam) Misi Pembangunan sebagai berikut :

- a) Memperkuat infrastruktur pendidikan dasar dan menengah untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi semua penduduk Cilegon;
- b) Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha melalui pembangunan ekonomi yang inklusif;
- c) Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat Cilegon;
- d) Mewujudkan transformasi digital pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif;
- e) Meningkatkan infrastruktur transportasi dan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk serta melestarikan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- f) Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dari uraian Misi Kota Cilegon Tahun 2025-2029, apabila dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mengambil peran dalam mensukseskan Misi ke 2 (dua) yaitu ***“Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha melalui pembangunan ekonomi yang inklusif”***. Pencapaian tujuan dan sasaran urusan ketenagakerjaan dalam Misi ke-2 dijabarkan melalui berbagai Program dan Kegiatan yang tertang pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029 di antaranya penguatan pelatihan berbasis kompetensi, optimalisasi penempatan tenaga kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta penguatan hubungan industrial yang kondusif. Upaya ini diharapkan mampu mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka dan memperluas kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat Kota Cilegon.

B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam melaksanakan tugas sebagai penunjang pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam Misi 2 (dua) RPJMD Kota Cilegon 2025-2029 yaitu ***“Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha melalui pembangunan ekonomi yang inklusif”***, dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi. Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029 tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029 adalah ***“Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan”***. Untuk mewujudkan tujuan perangkat daerah tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menetapkan Sasaran dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yaitu ***“Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja”***.

Berangkat dari misi dan agenda tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menyusun agenda pelaksanaan kinerja ke dalam beberapa program di antaranya :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;

Sebagai pembanding pada Misi dan Asgenda Pembangunan yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026, berikut ini dilampirkan Tujuan, Sasaran, serta Indikator yang menjadi pendukung yaitu :

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	62,97	71,20	75,30	78,00	82,20
1.1		Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	69,2 Poin	70,02 Poin	70,75 Poin	71,75 Poin	72,75 Poin
			Indeks RB Perangkat Daerah	58,3 Poin	55,8 Poin	57,8 Poin	60 Poin	62 Poin
			Pertumbuhan Realisasi Retribusi	100%	100%	5%	5%	5%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	65	67	69	70	72
2	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka	11,90%	11,16%	10,46%	9,81%	9,19%
2.1		Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	30%	30%	30%	30%	30%

Sumber : Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021-2026

Berikut ini dilampirkan Tujuan, Sasaran, serta Indikator yang menjadi pendukung dalam mewujudkan Misi yang melekat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029 yaitu :

Tabel 2.1.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,08%	5,96%	5,85%	5,73%	5,62%
1.1		Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kab/Kota	40,23%	44%	48%	52%	56%
			Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	20%	25%	30%	35%	40%
1.2		Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	86 Poin	87 Poin	88 Poin	89 Poin	90 Poin

Sumber : Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029

Berdasarkan kedua tabel tersebut di atas, Misi Kota Cilegon Periode 2021–2026 yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi sebagai pendorong kesempatan kerja, sedangkan untuk Misi Kota Cilegon Periode Periode 2025–2029 menunjukkan penguatan arah kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Urusan Ketenagakerjaan tidak hanya diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas, perlindungan, dan keberlanjutan kerja melalui penguatan kompetensi tenaga kerja, hubungan industrial yang harmonis, serta optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal. Penjabaran Program dan Kegiatan tersebut diselaraskan dengan **Janji Politik Wali Kota Cilegon Tahun 2025-2029**, salah satunya *“Modernisasi BLK berstandar Nasional untuk Masyarakat dan Kemitraan dengan Industri dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan”*.

2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2025–2029. IKU digunakan sebagai alat ukur kinerja utama Pemerintah Daerah yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) pembangunan, serta menjadi dasar dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja penyelenggaraan Kinerja. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan lainnya yang diberikan pada Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada Tahun 2025 yang sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai Komposit hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperoleh dari pengukuran aspek pengungkit		Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 060/Kep.239- ORG/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021- 2026
1.1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai komposit hasil evaluasi implementasi sakip pada Perangkat Daerah sesuai pedoman KemenpanRB	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	
		Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Komposit hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperoleh dari pengukuran aspek pengungkit pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	%	Persentase perubahan pada suatu periode dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya yang menggambarkan kinerja pemungutan retribusi dan efektifitas pengelolaan potensi pendapatan daerah	Persentase Laju Pertumbuhan Realisasi Retribusi tahun tertentu terhadap realisasi retribusi tahun sebelumnya	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Nilai hasil pengukuran kepuasan pengguna layanan terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik yang diperoleh melalui survey pada unsur pelayanan sesuai pedoman KemenpanRB	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	
2	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	%		Jumlah Penganggur Terbuka / Jumlah Angkatan Kerja) *100%	
2.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja		Perbandingan jumlah pencari kerja ditempatkan bekerja dengan jumlah pencari kerja terdaftar dalam satu periode	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan / Magang, dibagi Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	

Sumber : Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada Tahun 2025 yang sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
Renstra Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%		Jumlah Penganggur Terbuka / Jumlah Angkatan Kerja) *100%	Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 800.05/Kep.20 3-ORG/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025-2029
1.1	Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	%	- Pencari Kerja Terdaftar adalah Pencari Kerja yang terdaftar didalam " Karir Hub" - Pencari Kerja yang ditempatkan adalah Pencari kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri serta yang di magangkan (Alumni Pelatihan BLK dan Umum)	Pencari kerja yang ditempatkan (Dalam dan luar Negeri) baik melalui pelatihan serta yang dimagangkan/Pencari kerja yang terdaftar)*100%	
		Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	- Mengukur Presentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur Sekala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/jumlah perusahaan)*100%	
1.2	Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Nilai Komposit hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperoleh dari pengukuran aspek pengungkit		

Sumber : Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029

2.3. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mewujudkan peningkatan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja yang telah dituangkan sebelumnya pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Berikut ini Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021-2026 di antaranya :

Tabel 2.3.1
Rencana Kerja
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	82,2
1.1		Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	72,75
			Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	62
			Pertumbuhan Realisasi Retribusi	%	5
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	72
2	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,19
2.1		Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	%	30

Sumber : Renja Reguler Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Berikut ini Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021-2026 di antaranya :

Tabel 2.3.2
Rencana Kerja
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,08%
1.1		Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	%	40,23%
			Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	20%
1.2		Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	86

Sumber : Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Berdasarkan uraian kedua tabel tersebut, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada Tahun 2025 disusun sebanyak dua kali menyesuaikan dengan penyusunan anggaran kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Strategis yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya yang memuat Target dan Indikator Kinerja sebagai dasar Akuntabilitas Kinerja dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon. Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran strategis perangkat daerah. Seluruh indikator dan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja menjadi acuan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, sekaligus sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil.

Pada Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon hanya menyusun 1 kali Perjanjian Kinerja. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Kota Cilegon, seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan pada posisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang terjadi pada Bulan Februari 2025 lalu, sehingga penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,08
1.1	Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten / Kota	%	40,23
		Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	20
1.2	Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	86

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan, di mana setiap target kinerja yang ditetapkan dijabarkan secara langsung ke dalam Program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam Urusan Ketenagakerjaan. Program dan Kegiatan yang telah disusun bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Sasaran Strategis,

khususnya dalam peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan daya saing tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja. Keterpaduan antara Perjanjian Kinerja dan Program Kegiatan tersebut menjadi dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas.

Berikut rincian Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025, yang didasarkan pada Perencanaan Anggaran Awal Tahun 2025 yaitu :

Tabel 2.5.1
Program dan Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Lakip Perangkat Daerah	72,75 Poin	Rp. 10.289.535.581
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	50%	Rp. 3.719.498.416
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase Penempatan Tenaga Kerja	30%	Rp. 1.973.405.315
4.	Program Hubungan Industrial	Presentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	80%	Rp. 1.321.432.543

Sumber : Rencana Kerja Reguler Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada Penyusunan Anggaran Awal Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon memiliki Pagu Anggaran sebesar **Rp 17.303.871.855**. Seiring dengan dinamika yang terjadi sepanjang Tahun 2025, pada penyusunan Anggaran Perubahan Tahun 2025, Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi perekonomian yang mengalami pelambatan secara nasional, sehingga Pemerintah Kota Cilegon mengambil tindakan untuk menyikapi hal tersebut yaitu dengan melakukan Rasionalisasi Anggaran pada Seluruh Perangkat Daerah. Hal tersebut didasarkan pada :

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/933/SJ, tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Atas dasar itulah Pemerintah Kota Cilegon mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Cilegon Tanggal 20 maret 2025 Nomor. 445 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Surat Edaran tersebut terdapat penekanan bahwa untuk dilaksanakan :

1. Kebijakan Efisiensi Belanja Perangkat Daerah pada Anggaran perjalanan dinas pada Perangkat Daerah sebesar 70%, meniadakan belanja kegiatan studi banding, pengurangan anggaran mamin rapat sebesar 50%, anggaran publikasi sebesar 50%, efisiensi kendaraan dinas, efisiensi belanja honorarium, meniadakan belanja peralatan dan mesin, cenderamata, pengadaan seragam kegiatan;
2. Kebijakan efisiensi belanja khusus lainnya yang tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota.

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota tersebut, Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 mengalami perubahan anggaran, yang semula **Rp. 17.303.871.855,-** menjadi **Rp. 13.945.354.566,-**. Terdapat Rasionalisasi Anggaran sebesar **Rp 3.358.517.289**. Untuk rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.5.2
Program dan Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Anggaran Perubahan Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,9 (Poin)	Rp 10.340.406.829
		Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan	99,5 %	
		Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	75 (Skor)	
		Kinerja Pendapatan Retribusi Kewenangan Perangkat Daerah (OPD Penghasil)	100%	
		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah	3,0 (Skor)	
		Indeks Pelayanan Publik	2,67 (Poin)	
		Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah	55 (Skor)	
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	5%	Rp 1.830.416.146
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam Negeri	39%	Rp 365.400.000
4.	Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak - hak pekerja dan dialog sosial	112.296 Orang	Rp 1.409.131.591

Sumber : Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mengalami Rasionalisasi Anggaran secara signifikan untuk Belanja Kegiatan yang terdapat pada Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar **Rp. 1.608.005.315,-** dan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar **Rp. 1.889.082.270,-**. Hal tersebut tidak menjadi kendala bagi Internal Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk melakukan upaya yang optimal, dalam mensukseskan Program dan Kegiatan yang selaras dengan Agenda Pembangunan Pemerintah Kota Cilegon.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan indikator untuk mengukur Realisasi Capaian Kinerja di antaranya :

1. Nilai Sakip Perangkat Daerah;
2. Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan;
3. Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah;
4. Kinerja Pendapatan Retribusi Kewenangan Perangkat Daerah (OPD Penghasil);
5. Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah;

6. Indeks Pelayanan Publik;
7. Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah.

Di samping itu, Pada Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdapat Indikator Presentase Pencari Kerja yang Bersertifikat dan untuk Program Hubungan Industrial terdapat Indikator Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak - Hak Pekerja dan Dialog Sosial.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Analisis pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan Indikator Kinerja Sasaran serta rencana capaiannya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, serta pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, predikat nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja.

Berikut Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan kategori penilaian adalah :

Tabel 3.1.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$x > 100\%$
2	Baik	$80\% \leq x \leq 100\%$
3	Cukup	$60\% \leq x \leq 80\%$
4	Kurang	$20\% < x \leq 60\%$
5	Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$

Sumber : Bagian Organisasi dan RB Sekretariat Kota Cilegon

Pada Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

A. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	82,2	70,35	85,58%	-	
1.1	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	62 Poin	70,35 Poin	113,46%	Sangat Baik	Hasil Evaluasi LHE PMPRB Tahun 2024 oleh Inspektorat Kota Cilegon
		Nilai lakip Perangkat Daerah	72,75 Poin	83,40 Poin	114,63%	Sangat Baik	Hasil Evaluasi LHE AKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	72 Poin	88,36 Poin	122,72	Sangat Baik	Hasil Perhitungan Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setda kota cilegon
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	5%	-22,60%	-452%	Sangat Kurang	Hasil Perhitungan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Per 31 Desember 2025
2	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,19%	7,41%	80,63%	Baik	Release Data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon pada Bulan Agustus 2025
2.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	30%	48,31%	161,03%	Sangat Baik	Data Bidang Perencanaan, Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Kerja Tahun 2025

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Berdasarkan tabel data di atas, terdapat Dua Tujuan / Sasaran dan Lima Indikator Kinerja yang memenuhi target yang telah ditetapkan. dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja **sangat baik**. Evaluasi dan analisis capaian dari masing-masing Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 sebagai berikut :

 Sasaran Strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur*

➤ **Indikator Nilai Lakip Perangkat Daerah Tahun 2025**

Pada Tahun 2025, untuk Indikator Nilai Lakip Perangkat Daerah tersebut berhasil melewati target yang telah ditetapkan, dengan nilai **83,40** poin. Penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mendapat predikat **A (Memuaskan)**. Penilaian tersebut didasarkan pada komponen aspek manajemen sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Capaian Nilai Lakip Per Komponen Manajemen Kinerja Tahun 2025

NO	UNSUR	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	25,71
2	Pengukuran Kinerja	19,86
3	Pelaporan Kinerja	12,83
4	Evaluasi Internal	25,00
Total		83,40

Sumber : LHE sakiip Disnaker Kota Cilegon Tahun 2024

Berdasarkan uraian capaian di atas, dalam peningkatan Indeks Nilai Lakip Perangkat Daerah terdapat beberapa faktor pendukung di antaranya :

1. Telah dilakukanya tindak lanjut perbaikan dari Laporan Hasil Evaluasi pada tahun sebelumnya;
2. Kualitas perencanaan kinerja yang terukur dan selaras antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja;
3. Pelaporan kinerja yang disusun berdasarkan analisis capaian serta perbandingan target lainnya;
4. Telah dilakukannya evaluasi internal pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

➤ **Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025**

Dari hasil pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 berhasil melewati target yang ditetapkan, yakni mencapai **70,35** poin. Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 mendapat predikat **BB** (Sangat Baik). Berikut disajikan tabel penilaian RB Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025.

Tabel 3.1.4
Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Disnaker 2025

Aktivitas	Skor
I. Pemenuhan	8,60
II. Reform	16,94
Total I + II	25,54
Hasil Konversi	70,35

Sumber data : LHE PMPRB Disnaker Kota Cilegon Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan Nilai Indeks RB Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dari tahun sebelumnya di antaranya :

1. Adanya perbaikan Tata Kelola dan Proses Bisnis Layanan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon;
2. Digitalisasi dan pemanfaatan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik seperti penggunaan Website Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (www.disnakercilegon.go.id) dan Media Sosial Resmi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon seperti instagram (@disnakercilegon dan @antarkerja.cilegon), Aplikasi SIAPKERJA, Aplikasi Cilegon Juare yang efektif dan transparan sebagai Penyampaian Informasi dan Layanan kepada masyarakat Kota Cilegon;
3. Adanya penguatan integritas dan pengawasan terhadap Layanan Pengaduan Masyarakat salah satunya melalui Aplikasi SP4N Lapor;
4. Konsistensi penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan melalui SIPD-RI dan Aplikasi E-Sakip;
5. Adanya penataan organisasi dan SDM Aparatur seperti penggunaan Aplikasi Srikandi untuk mempermudah Pelaksanaan Kegiatan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, penggunaan Aplikasi SIMAK untuk

mempermudah layanan kepegawaian; penggunaan Aplikasi SIMANTAP untuk Pelaporan Kinerja Pegawai serta penggunaan Aplikasi E-Kin untuk Pengukuran Kinerja Pegawai;

6. Adanya upaya perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi RB pada tahun sebelumnya oleh Internal Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

➤ Indikator Pertumbuhan Realisasi Retribusi Tahun 2025

Indikator Pertumbuhan Realisasi Retribusi Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerjanya di bawah target yang ditetapkan dengan realisasi -22,60% dari target yang ditetapkan sebesar 5%. Hal tersebut didasarkan pada hasil perhitungan Capaian Realisasi Penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Tahun 2025, yang lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2024. Berikut ini disajikan perbandingan Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun 2024 dan 2025 untuk mengetahui Tingkat Pertumbuhan Realisasi Retribusi Tahun 2025, yaitu :

Tabel 3.1.5
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
Tahun 2024 dan 2025

TAHUN	TARGET (REGULER)	TARGET (PERUBAHAN)	REALISASI	CAPAAN (%)
2024	4.500.000.000	9.000.000.000	13.615.698.000	151%
2025	6.000.000.000	10.500.000.000	Rp. 10.529.309.400	100,28%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

$$\text{Pertumbuhan Realisasi Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Tahun 2025} - \text{Realisasi Retribusi Tahun 2024}}{\text{Realisasi Retribusi Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Realisasi Retribusi} = \frac{\text{Rp. 10.529.309.400} - \text{Rp. 13.615.698.000}}{\text{Rp. 13.615.698.000}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Realisasi Retribusi Tahun 2025 = - 22,60%

Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh penurunan Jumlah Tenaga Kerja Asing yang melakukan Perpanjangan Izin Kerja. Pada Tahun 2025, Jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Cilegon sebanyak 1.166 orang, menurun dibandingkan dengan Jumlah Tenaga kerja Asing Tahun 2024 yang mencapai 1.451 orang. Data tersebut diperoleh dari situs tka-daerah.kemnaker.go.id. Penurunan Jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Wilayah Kota Cilegon dipengaruhi oleh selesainya tahapan konstruksi perusahaan dan beralihnya kegiatan perusahaan ke tahap operasional, sehingga kebutuhan terhadap Tenaga Kerja Asing mengalami penurunan signifikan. Hal tersebut didasarkan pada fase operasional hanya jabatan tertentu yang bersifat strategis dan membutuhkan keahlian khusus yang masih diisi oleh Tenaga Kerja Asing. Sebagian besar kebutuhan tenaga kerja pada tahap ini telah dialihkan kepada tenaga kerja lokal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan prioritas penggunaan Tenaga Kerja Dalam Negeri. Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tetap melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing, serta memastikan bahwa setiap perpanjangan Tenaga Kerja Asing yang dilakukan oleh perusahaan di Wilayah Kota Cilegon telah memenuhi ketentuan dan melakukan kewajiban pembayaran Retribusi kepada Pemerintah Kota Cilegon.

Dengan demikian, penurunan Pertumbuhan Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Tahun 2025 disebabkan oleh berkurangnya Jumlah Objek Retribusi secara struktural. Khusus untuk Indikator Pertumbuhan Realisasi Retribusi, apabila mengalami penurunan hal tersebut **bukan** disebabkan oleh lemahnya pengelolaan pemungutan retribusi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon akan tetapi menjadi salah satu pendorong untuk menyerap kebutuhan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang Kompeten dan dibutuhkan oleh Dunia Industri.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.1.6
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,08%	7,41%	78%	Cukup	Rilis BPS Kota Cilegon pada bulan agustus 2025
1.1	Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	40,23%	48,31%	120,08%	Sangat Baik	Bidang Perencanaan, Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Kerja Tahun 2025
		Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	20%	11,10%	55,50%	Sangat Kurang	Data Bidang Hubungan Industrial Tahun 2025
1.2	Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	86 Poin	70,35	81,80%	Baik	Hasil evaluasi PMPRB tahun 2024 oleh Inspektorat

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Sasaran Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Pada Tahun 2025, Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar (AK1) pada Aplikasi SIAPKERJA tercatat sebanyak 4.276 orang. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 yang berjumlah 6.430 orang. Di samping itu, Jumlah Pencari Kerja yang berhasil Ditempatkan sebanyak 2.066 orang, yang terdiri dari Penempatan Kerja Dalam Negeri sebanyak 1.884 orang, Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 124 orang dan Pemagangan sebanyak 58 orang. Meskipun secara signifikan terjadi penurunan jumlah penempatan tenaga

kerja dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebagai penyebut indikator terjadi lebih signifikan, sehingga rasio antara pencari kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja yang terdaftar menjadi meningkat. Dengan demikian, Persentase Penempatan Tenaga Kerja mencapai 48,31%, melampaui target yang telah ditetapkan.

Penurunan jumlah pencari kerja terdaftar Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya :

- a. Meningkatnya kecenderungan lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang didukung oleh peningkatan kemampuan ekonomi keluarga serta adanya "*Program Beasiswa Full Sarjana*" dari Pemerintah Kota Cilegon, sehingga sebagian lulusan tidak langsung memasuki pasar kerja dan tidak melakukan pendaftaran Kartu AK1;
- b. Bidang Perencanaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja secara konsisten tetap melaksanakan program pelayanan antar kerja seperti penyuluhan dan bimbingan jabatan, sosialisasi mekanisme penempatan tenaga kerja, penyampaian informasi pasar kerja melalui pemantauan lowongan, serta fasilitasi rekrutmen tenaga kerja dan pelaksanaan job fair bekerja sama dengan perusahaan;
- c. Penguatan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui "*Forum Komunikasi HRD Perusahaan*", menjadi salah satu pendorong dalam meningkatkan efektivitas Program Penempatan Tenaga Kerja.

Berikut ini data pendukung Capaian Realisasi Kinerja pada Indikator Tingkat Penempatan Tenaga Kerja yaitu :

Tabel 3.6
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Pencari Kerja	Jumlah Penempatan
1	Januari	413	546
2	Februari	329	22
3	Maret	184	45
4	April	224	49
5	Mei	700	149
6	Juni	440	54
7	Juli	501	24
8	Agustus	312	108
9	September	434	117
10	Oktober	308	61
11	November	228	108
12	Desember	203	601
Jumlah		4.276	1.884

Sumber : Data Bidang Perencanaan,, Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, pada Bulan Mei Tahun 2025 terdapat peningkatan jumlah pencari kerja dibandingkan dengan bulan sebelumnya, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kebutuhan ekonomi salah satunya kebutuhan masyarakat Pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Adapun untuk Jumlah Penempatan Tenaga Kerja tertinggi tercatat pada Bulan Desember 2025, dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang baru melaporkan pelaksanaan Rekrutmen Pegawai di penghujung akhir Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 Pekerja Migran asal Kota Cilegon yang bekerja di Luar Negeri sebanyak 124 orang yang tersebar ke beberapa negara di Wilayah Benua Asia, Afrika dan Eropa. Berikut ini Negara yang menjadi tujuan Pekerja Migran Indonesia asal Kota Cilegon :

Tabel 3.7
Data Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan Pemberangkatan
Bulan Januari – Desember Tahun 2025

No	Negara Tujuan	Jumlah Penempatan
1	Arab Saudi	20 Orang
2	Brunai Darussalam	6 Orang
3	Hongkong	11 Orang
4	Jepang	9 Orang
5	Korea Selatan	7 Orang
6	Malaysia	20 Orang
7	Singapura	11 Orang
8	Taiwan	19 Orang
9	Uni Emirat Arab	4 Orang
10	Turki	9 Orang
11	Zambia	4 Orang
12	Italia	2 Orang
13	Qatar	1 Orang
14	Kuwait	1 Orang
Jumlah		124 Orang

Sumber : CNC BP3MI Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2025 negara yang menjadi tujuan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia asal Kota Cilegon terbanyak menuju ke Negara Arab Saudi dan Malaysia.

Di samping itu, selain kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri, yang menjadi tolak ukur dalam indikator Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan Pemagangan yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di Wilayah Kota Cilegon. Pada Tahun 2025, Jumlah Peserta Pemagangan yang berdomisili di Wilayah Kota Cilegon (ber-KTP Cilegon) sebanyak 58 orang, yang tersebar pada 9 perusahaan, di antaranya :

Tabel 3.8
Data Peserta Pemagangan
Bulan Januari – Desember Tahun 2025

NO	Nama Perusahaan	Jumlah Peserta Magang	Cilegon	Luar Cilegon
1	PT. Indorama Petrochemicals	16	15	1
2	PT. Bank Rakyat Indonesia	2	2	0
3	PT. Pelat Timah Nusantara	14	14	0
4	PT. Bank Central Asia	5	1	4
5	PT. Krakatau Osaka Steel	7	7	0
6	PT. Communication Cable System Indonesia	1	1	0
7	PT. Neomax Magnetic Technologies	5	5	0
8	PT. Dover Chemical	19	13	6
9	Hero Supermarket-Cilegon	2	0	2
Jumlah		71	58	13

Sumber : Data Bidang Perencanaan,, Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2 Perusahaan yang melakukan kegiatan pemagangan terbanyak untuk Tenaga Kerja Kota Cilegon sepanjang Tahun 2025 yaitu PT. Indorama Petrochemicals dan PT. Pelat Timah Nusantara.

B. Perbandingan Capaian Organisasi Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021-2026, Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9.1
Perbandingan Capaian Kinerja
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	78	70,35	90,19%	82,2	70,35	85,58%
1.1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	60 Poin	70,35 Poin	117,25%	62 Poin	70,35 Poin	113,47%
		Nilai lakip Perangkat Daerah	71,75 Poin	79,83 Poin	111,2%	72,75 Poin	83,40 Poin	114,64%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	70 Poin	86,71 Poin	123,8%	72 Poin	88,36 Poin	122,72%
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	5%	37,53%	754,6%	5%	-22,60	-452%
2	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,81%	6,08%	138,02%	9,19%	7,41%	119,36%
2.1	Meningkatnya kesempatan kerja Masyarakat	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	30%	40,23%	134,1%	30%	48,31%	161,03%

Sumber : Data pada Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2025;

Secara umum, Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat indikator yang capaian kinerjanya mengalami penurunan atau belum mencapai target yang ditetapkan, kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya, dinamika pasar kerja dan kondisi perekonomian nasional yang mengalami pelambatan. Berdasarkan tabel di atas, perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, untuk Indikator Pertumbuhan Realisasi Retribusi tidak mencapai target, berbeda dengan capaian kinerja pada Tahun 2024. Untuk Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi, Realisasi Capaian Kinerja terdapat kesamaan nilai, dikarenakan belum adanya Penilaian kembali untuk Indeks RB Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Kementerian

Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025 melalui Inspektorat Kota Cilegon, sehingga masih menggunakan data Realisasi Capaian Kinerja pada penilaian tahun sebelumnya.

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, perbandingan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon antara Tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9.2
Perbandingan Capaian Kinerja
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,81%	6,08%	138,02%	6,08%	7,41%	78,12
1.1	Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayahKab/Kota	30%	40,23%	134%	40,23%	48,31%	120,08%
		Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-	-	-	20%	11,10%	55,50%
1.2	Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85,77	70,35	82,02	86 Poin	70,35 Poin	81,80%

Sumber : Data pada Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2025;

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dari beberapa Indikator yang diukur pada Tahun 2025 dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka;

Pada Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan capaian kinerja yang cukup signifikan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pemicu di antaranya :

- a. Kondisi perekonomian nasional yang mengalami pelambatan;
- b. Jumlah angkatan kerja yang meningkat tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia;
- c. Adanya kesenjangan kompetensi tenaga kerja pada Dunia Usaha dan Dunia Industri;
- d. Adanya restrukturisasi dan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja;
- e. Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja di Wilayah Kota Cilegon.

2. Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kab/Kota, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami penurunan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Adanya penurunan jumlah pencari kerja terdaftar;
- b. Rendahnya partisipasi dalam kegiatan pelayanan antar kerja;
- c. Dinamika dan kondisi dunia usaha yang terdampak dari ekonomi global.

3. Indikator Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak;

Indikator Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal tersebut dipengaruhi oleh :

- a. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran perusahaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan khususnya terkait penyusunan PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Keterbatasan pembinaan dan pengawasan, sehubungan dengan kewenangan Pembinaan dan Pengawasan yang hanya dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi, sehingga menjadi hambatan untuk Internal Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

ketenagakerjaan kepada perusahaan yang berada di Wilayah Kota Cilegon, mengingat adanya tahapan birokrasi yang harus dilalui;

- c. Minimnya peran LKS Bipartit pada sebagian perusahaan yang menyebabkan kurang optimalnya dialog sosial antar pekerja dan manajemen perusahaan.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Pada Rencana Strategis

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahunan dengan Target Jangka Menengah dilakukan untuk menilai sejauh mana realisasi kinerja pada tahun berjalan berkontribusi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan Realisasi Indikator Kinerja pada tahun berjalan terhadap target akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat pada Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Periode 2021-2026 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10.1
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,41%	8,62%	114,03%
1.1	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	70,35 Poin	64 poin	109,9%
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	83,40 Poin	73 poin	114%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,36 Poin	74 poin	119%
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	-22,6 %	5 %	-452%
2.1	Meningkatnya kesempatan kerja Masyarakat	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	48,31 %	30 %	161%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat pada Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10.2
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,41%	5,62%	68,14%
1.1	Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayahKab/Kota	48,31%	56%	86,26%
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	11,10%	40%	27,75%
1.2	Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,35	90 Poin	78,16%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Berdasarkan uraian kedua tabel di atas, secara umum Realisasi Capaian Kinerja tahunan menunjukkan tren yang sejalan dengan Target Jangka Menengah. Beberapa Indikator Kinerja telah berada pada jalur pencapaian yang diharapkan, bahkan melampaui Target Jangka Menengah. Hal ini mencerminkan efektivitas program dan kegiatan dalam mendukung pencapain sasaran strategis. Namun demikian, masih terdapat indikator yang capaian tahunannya belum sepenuhnya sesuai dengan Target Jangka Menengah. Salah satunya, Indikator Pertumbuhan Realisasi Retribusi yang mengalami penurunan capaian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, sehingga diperlukan penguatan strategi, penyesuaian program, serta optimalisasi sumber daya pada tahun berikutnya agar Target Jangka Menengah dapat tercapai.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan Realisasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dengan Capaian Kinerja Nasional sebagai tolak ukur untuk menilai posisi dan daya saing kinerja Perangkat Daerah. Berikut ini perbandingan Capaian Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dengan Standar Nasional, di antaranya :

Tabel 3.11.1
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,41%	4,85%	47,21%
1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	48,31%	N/A	N/A

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Tabel 3.11.2
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,41%	4,85%	47,21%
1.1	Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kab/Kota	48,31%	N/A	N/A
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	11,10%	N/A	N/A

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, terdapat Indikator kinerja Tingkat Penempatan Tenaga Kerja yang tidak memiliki standar nasional, oleh karena itu Indikator Tingkat Penempatan Tenaga Kerja hanya bisa diukur di Wilayah Kabupaten / Kota. Untuk nilai Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, Kota Cilegon masih berada di level atas dibandingkan dengan Nilai Nasional secara keseluruhan dengan selisih nilai sebanyak 2,56%. Kesenjangan nilai tersebut mencerminkan adanya permasalahan tertentu di Wilayah Kota Cilegon, seperti minimnya peluang kerja sesuai keterampilan tenaga kerja di Kota Cilegon, keterbatasan penyerapan tenaga kerja pada Perusahaan / Industri, adanya ketidaksesuaian antara keterampilan para Lulusan Sekolah dengan kebutuhan Pasar Kerja. Ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran di Kota Cilegon lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sehingga perlu kebijakan ekonomi serta ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Kolaborasi serta Peran Pemerintah Daerah baik level Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan, guna mengantisipasi lonjakan angka Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun mendatang.

E. Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Tahun 2025 serta Solusi yang Dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja Tahun 2025 dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hasil analisa ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang.

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan Indikator Kinerja serta Solusi yang dilakukan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12.1
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	82,2	70,35	85,58	Terjadinya efektivitas implementasi reformasi birokrasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan.	penguatan manajemen kinerja yang lebih terukur, keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	62 Poin	70,35 Poin	113,47%	Terjadinya efektivitas implementasi reformasi birokrasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan.	Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur pelayanan
		Nilai Laki Perangkat Daerah	71,75 Poin	83,40 Poin	114,64%	efektivitas pengelolaan kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Penyelarasan perencanaan program dan kegiatan dengan sasaran strategis, indikator kinerja yang lebih terukur, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja. Mendaklanjuti hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program
		Indeks Kepuasan Masyarakat	72 Poin	88,36 Poin	122,72	komitmen Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.	Melakukan perbaikan standar pelayanan, kejelasan prosedur dan persyaratan layanan, peningkatan kompetensi serta sikap responsif petugas layanan antar kerja, serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	5%	-22,60%	-452%	menurunnya jumlah permohonan dan perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja asing seiring dengan	pemutakhiran basis data Tenaga Kerja Asing, melakukan optimalisasi peran pengantar kerja dalam

						perlambatan aktivitas investasi.	pengawasan dan fasilitasi kepatuhan perusahaan pengguna tenaga kerja asing
2	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,19%	7,41%	119,36%	ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, terjadinya penyesuaian kebutuhan tenaga kerja di sektor industri, termasuk efisiensi dan otomatisasi proses produksi perusahaan, belum optimalnya kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, terbatasnya informasi lowongan kerja yang dapat diakses secara luas.	Memperkuat fungsi layanan AK1, bursa kerja online, dan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi agar pencari kerja lebih mudah mengakses informasi lowongan secara cepat dan akurat, Menyelenggarakan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, Mendorong perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal melalui fasilitasi rekrutmen, pendampingan kepatuhan ketenagakerjaan, serta sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan daerah. Koordinasi lintas sektoral untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan dengan arah pembangunan daerah.
2.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	30,00%	48,31%	161,03%	Adanya optimalisasi fungsi pelayanan penempatan dan memperluas akses pencari kerja terhadap kesempatan kerja.	peningkatan kualitas pendataan pencari kerja dan lowongan kerja, pemanfaatan sistem informasi pasar kerja, serta pelatihan pencari kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Tabel 3.12.2
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,08%	7,41%	78,12	Sinergi program lintas sektor belum optimal.	Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi lowongan kerja, AK1, dan bursa kerja online agar pencari kerja memperoleh informasi kerja secara cepat, akurat, dan mudah diakses, Memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri melalui MoU penyerapan tenaga kerja lokal, penyampaian kebutuhan tenaga kerja secara berkala, serta fasilitasi rekrutmen langsung oleh perusahaan, Menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai kebutuhan sektor unggulan daerah.
1.1	Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	40,23%	48,31%	120,08%	Adanya optimalisasi fungsi pelayanan penempatan dan memperluas akses pencari kerja terhadap kesempatan kerja.	Melakukan peningkatan kualitas pendataan pencari kerja dan lowongan kerja, pemanfaatan sistem informasi pasar kerja, serta pelatihan pencari kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	20%	11,10%	55,50%	Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan pemahaman perusahaan terhadap kewajiban normatif ketenagakerjaan, Masih terbatasnya koordinasi lintas instansi dan minimnya insentif maupun sanksi yang mendorong kepatuhan perusahaan secara berkelanjutan	Mengoptimalkan pendataan dan pemetaan perusahaan secara terintegrasi, Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala kepada perusahaan terkait kewajiban normatif ketenagakerjaan, Mendorong kepatuhan

							perusahaan melalui pemberian insentif non-fiskal (penghargaan, prioritas layanan, rekomendasi).
1.2	Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	86	70,35	81,80%	Terjadinya efektivitas implementasi reformasi birokrasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan.	penguatan manajemen kinerja yang lebih terukur, keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur pelayanan.

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, secara garis besar Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sudah berupaya untuk merealisasikan Sasaran Strategis yang ditunjang dengan Indikator Kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada Tahun 2025 telah diarahkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Secara umum, Program dan Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan, baik dari sisi pelaksanaan anggaran maupun Capaian Indikator Kinerja. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas perencanaan dan pengendalian kinerja, serta keterkaitan yang semakin kuat antara Program, Kegiatan, dan Capaian Kinerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang capaian kinerjanya belum optimal pada Tahun 2025. Berikut ini analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, di antaranya :

Tabel 3.13
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Bulan Januari – Desember Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Peningkatan layanan pemerintahan						
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur						
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA			
					Indeks RB Perangkat Daerah	113,46	Menunjang
					Nilai Lakip Perangkat Daerah	114,63	Menunjang
					Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	122,72	Menunjang
					Pertumbuhan Realisasi Retribusi	-452	Tidak Menunjang
					Kinerja pendapatan retribusi kewenangan perangkat daerah (OPD penghasil)	100,28	Menunjang
					Indeks Pelayanan Publik	100	Menunjang
					Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah	118,2	Menunjang
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah	118,3	Menunjang
					Nilai Sakip Perangkat Daerah	104,38	Menunjang
					Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Persentase BMD dalam Kondisi Baik dan Termanfaatkan	99,2	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	100	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100%	Menunjang

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	100%	Menunjang
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dihasilkan	100%	

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Menunjang
2.	Pemerataan kesejahteraan masyarakat						
	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat						
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
					Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	62,48%	Menunjang
					Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang mendapatkan pembinaan	85,71%	Menunjang
					Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	132,8	Menunjang
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan dan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	100%	
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100%	Menunjang

				Klaster Kompetensi			
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
					Persentase Penempatan Tenaga Kerja	161 %	Menunjang
					Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	116,4%	Menunjang
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	100%	
				Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	125,6%	Menunjang
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	83,33%	Menunjang
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50%	Tidak Menunjang
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100%	Menunjang
				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50%	Menunjang
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah laporan kegiatan perlindungan pmi (pra dan purna penempatan) di daerah kab/kota	100%	
				Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (cpmi) / pekerja migran indonesia (pmi)	Jumlah kegiatan sosialisasi calon pekerja migran	100%	Menunjang
				Pemberdayaan Pekerja migran indonesia purna penempatan	Koordinasi pekerja migran indonesia purna penempatan	100%	Menunjang
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			

					Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	50%	Tidak Menunjang
					Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	81,34%	Menunjang
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab / Kota	Jumlah Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial	100%	
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100%	Menunjang
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	100%	Menunjang
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	169,85 %	Menunjang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Sub Kegiatan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sangat mendukung dalam pencapaian Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Tenaga

Kerja Kota Cilegon. Pada Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 terdapat beberapa Indikator yang melebihi target, di antaranya :

1. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;**

Secara keseluruhan Realisasi Capaian Kinerja Sub Kegiatan yang mendukung Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan mencapai target yang telah ditetapkan. Terdapat Indikator Program yang melebihi target kinerja, yaitu Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat yang mencapai 132,81 %. Adapun yang menjadi faktor pendorong di antaranya terjadinya penurunan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sebanyak 4.276 Orang, dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 6.430 Orang;

2. **Program Penempatan Tenaga Kerja;**

Secara keseluruhan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Program melebihi target yang telah ditetapkan di antaranya :

- a. **Persentase Penempatan Tenaga Kerja**, Realisasi Capaian Kinerja Indikator mencapai 161 %. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan jumlah pencari kerja terdaftar sebagai penyebut indikator terjadi lebih signifikan, sehingga rasio antara pencari kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja yang terdaftar meningkat.
- b. **Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri**, Realisasi Capaian Kinerja Indikator mencapai 116,4 %. Hal ini disebabkan oleh berkurang Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar, sehingga rasio pembandingan menjadi lebih rendah.

3. **Program Hubungan Industrial;**

Pada Program Hubungan Industrial terdapat Realisasi Capaian Kinerja yang melebihi target pada **Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja** yang mencapai 169,85 %. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan besaran iuran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh APBD Kota Cilegon untuk kategori Pekerja Non Formal (Ketua RT/RW, Kader Cilegon Mandiri, Anggota Linmas, Pasukan Kuning dan atau pekerja lainnya yang menerima honor dari Pemerintah Kota Cilegon) semula Rp16.800 Menjadi Rp 10.800, sehingga Capaian Realisasi Kinerja mencapai 7.898 orang dari target dari 4.850 orang.

Perubahan Besaran Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilatarbelakangi oleh adanya kewajiban pembayaran utang Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2024, yang baru bisa dibayar pada Bulan Januari 2025. Sehingga alokasi anggaran Tahun 2025 mengalami pengurangan dari perencanaan sebelumnya. Adapun perubahan Besaran Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Serang dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 800.1.12.1/058/HubinJSK, Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran di Kota Cilegon.

Di samping itu, pada Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 terdapat beberapa Indikator yang belum mencapai target, di antaranya :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;

- a. **Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi** hanya mencapai 62,48 %. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada UPTD Latihan Kerja yang semula 13 kegiatan pelatihan menjadi 3 kegiatan pelatihan, sehubungan dengan dampak Rasionalisasi Anggaran pada Tahun 2025 (pembahasan pada Bab sebelumnya);
- b. **Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang Mendapatkan Pembinaan** mencapai 85,71 %. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya partisipasi aktif dari Lembaga Pelatihan Kerja di Wilayah Kota Cilegon untuk mengikuti pembinaan dan pengembangan kapasitas lembaga. Dari 20 Lembaga Pelatihan Kerja yang ada di Kota Cilegon, hanya 12 Lembaga Pelatihan Kerja yang secara aktif mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pelatihan Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja. Hal ini menjadi evaluasi untuk Bidang Perencanaan Pelatihan Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja untuk berperan secara optimal dalam melakukan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja;

Secara keseluruhan Untuk Realisasi Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan yang mendukung Program Penempatan Tenaga Kerja telah mencapai target yang

ditetapkan. Akan tetapi terdapat beberapa Sub Kegiatan yang Realisasi Capaian Kinerja tidak mencapai target, di antaranya :

- a. **Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja**, Realisasi Capaian Kinerja mencapai 83,33 %. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya peserta yang mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan yang semula ditargetkan 450 orang, terealisasi 375 orang.
- b. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas**, Realisasi Capaian Kinerja mencapai 50 %. Hal ini disebabkan oleh ketidak sesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Bidang Perencanaan Pelatihan Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja, sehingga Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Unit Layanan Disabilitas pada Tahun 2025 sebanyak 20 orang, dari target yang telah ditetapkan yaitu 40 orang.

3. **Program Hubungan Industrial;**

Secara keseluruhan Realisasi Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Program Hubungan Industrial telah mencapai target. Akan tetapi untuk Capaian Kinerja untuk Indikator Program yakni :

- a. **Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**, Realisasi Capaian Kinerja mencapai 50 % tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor eksternal yakni kompleksitas permasalahan Hubungan Industrial yang ditangani, serta kecenderungan sebagian pihak untuk melanjutkan penyelesaian kasus ke Pengadilan Hubungan Industrial guna memperoleh kepastian hukum. Di samping itu, Mediator Hubungan Industrial memiliki keterbatasan kewenangan sebagai fasilitator, sehingga keberhasilan penyelesaian melalui Perjanjian Bersama bergantung pada iktikad baik antara pekerja dan perusahaan;
- b. **Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial**, Realisasi Capaian Kinerja mencapai 81,34 % tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap Norma Ketenagakerjaan, serta penerapan Dialog Sosial di tingkat perusahaan belum dilaksanakan secara optimal. Di samping itu, kurangnya pemahaman pada Pekerja Non Formal terhadap manfaat dan pentingnya.

Perlindungan Tenaga Kerja. Selain itu, Pada Tahun 2025 Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja terjadi di Wilayah Kota Cilegon dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sebanyak 809 orang, dibandingkan dengan Data Pemutusan Hubungan Kerja Tahun 2024 hanya 106 orang

3.2 Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegons

Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada Tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian Program dan Kegiatan. Secara keseluruhan, realisasi anggaran telah berjalan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, dengan proporsi tertinggi pada Belanja Operasional dan Belanja Modal untuk Program Prioritas. Meskipun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya belum optimal akibat faktor internal maupun eksternal, di antaranya adanya Rasionalisasi Anggaran, keterlambatan proses pengadaan, perubahan kebutuhan di lapangan, dan lainnya.

Berikut ini Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sebagai berikut :

Tabel 3.14
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Bulan Januari – Desember Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.340.406.829	9.898.479.674	95,73%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.294.000	30.281.000	29,89%
1.3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.123.539.751	7.094.273.152	99,59%
1.	Administrasi Pendapatan Perangkat Daerah	3.442.000	2.368.000	68,80%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.698.375	299.971.735	93,83%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.241.470.088	2.043.710.312	91,18
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.962.615	427.875.475	77,66%
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.830.416.146	1.805.943.186	98,66
2.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.830.416.146	1.805.943.186	98,66%
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	365.400.000	275.280.000	75,34%
3.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	269.980.000	227.760.000	84,36%
3.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	45.280.000	9.720.000	21,47%
3.3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	50.140.000	37.800.000	75,39%
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.409.131.591	1.374.381.787	97,53%
4.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	1.409.131.591	1.374.381.787	97,53%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam Tahun 2025 sebesar **Rp. 17.303.871.855,-** kemudian mengalami perubahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 menjadi **Rp. 13.945.354.566,-** dengan total Realisasi Anggaran mencapai **Rp. 13.354.084.647,-** dengan persentase **95,76%**.

Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon melaksanakan :

- 4 Program;
- 12 Kegiatan;
- 37 Sub Kegiatan;

Alokasi Belanja Daerah Tahun 2025 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sebagai berikut :

✚ **Belanja Operasi** sebesar **Rp. 13.945.354.566**, dengan Realisasi Capaian Anggaran sebesar **Rp. 13.354.084.647**;

Pada Belanja Operasi terbagi menjadi :

1. **Belanja Pegawai** sebesar **Rp. 7.195.518.751** dengan Realisasi Capaian Anggaran sebesar **Rp. 7.171.432.152**;
2. **Belanja Barang dan Jasa** sebesar **Rp. 6.749.835.815** dengan Realisasi Capaian Anggaran sebesar **Rp. 6.182.652.495**;

✚ **Belanja Modal**;

Pada Tahun 2025, salah satu dampak dari adanya Rasionalisasi Anggaran adalah tidak tersedia Anggaran Belanja Modal pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi sumber daya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menunjukkan sejauh mana penggunaan anggaran, sarana prasarana, dan tenaga kerja diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal. Secara umum, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon telah melakukan pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan efektivitas biaya dan produktivitas kegiatan, termasuk pengalokasian anggaran sesuai prioritas program dan optimalisasi tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan. Berikut ini perbandingan atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15.1
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	82,20	70,35	85,58	10.340.406.829	9.898.479.674	95,73	0,89
1.1	Nilai Lakip Perangkat Daerah	72,75	83,40	114,63	7.775.796.366	7.552.429.627	97,12	1,18
1.2	Indeks RB Perangkat Daerah	62	70,35	113,46	-	-	-	-
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	72	88,36	122,7	2.561.168.463	2.343.682.047	91,50	1,34
1.4	Pertumbuhan Realisasi Retribusi	5	-22,60	-452	3.442.000	2.368.000	68,80	-6,5
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	9,19	7,41	119,36	3.604.947.737	3.455.604.973	95,85%	1,24
2.1	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	30	48,31	161,03%	3.604.947.737	3.455.604.973	95,85%	1,68

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, penggunaan anggaran dalam pencapaian target indikator sasaran berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dinilai efektif. Hal ini terlihat dari perhitungan angkat tingkat efisiensi di atas angka 1.

Tabel 3.15.2
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
1	Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan	6,08%	7,41%	78,12%	13.945.354.566	13.354.084.647	95,76	0,81
1.1	Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	40,23%	48,31%	120,08%	2.195.816.146	2.081.223.186	94,78%	1,26
		20%	11,10%	55,50%	1.409.131.591	1.374.381.787	97,53%	0,56
1.2	Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	86 Poin	70,35 Poin	81,80%	10.340.406.829	9.898.479.674	95,73%	0,85

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, penggunaan anggaran dalam pencapaian target indikator sasaran berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dinilai efektif. Hal ini terlihat dari realisasi penyerapan anggaran yang melebihi 95%, dan tingkat efisiensi di atas angka 1. Akan tetapi terdapat Sasaran yang tingkat efisiensi di bawah angka 1.

Untuk meningkatkan efisiensi, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon akan terus melakukan penguatan perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi penggunaan tenaga kerja dan fasilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelaksanaan program. Upaya ini diharapkan mampu memaksimalkan hasil dari setiap sumber daya yang tersedia, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan secara efektif dan akuntabel di masa mendatang.

Tabel 3.16
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86	70,35	81,80	10.340.406.829	9.898.479.674	95,73	0,85
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	100	101.294.000	30.281.000	29,89	3,34
1.2	Administrasi Pendapatan	1 Dok	1 Dok	100	3.442.000	2.368.000	68,80	1,45
1.3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dok	5 Dok	100	7.123.539.751	7.094.273.152	99,59	1
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dok	7 Dok	100	319.698.375	299.971.735	93,83	1,06
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dok	3 Dok	100	2.241.470.088	2.043.710.312	91,18	1,09
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127 Unit	127 Unit	100	550.962.615	427.875.475	77,66	1,28
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5	6,64	132,8	1.830.416.146	1.805.943.186	98,66	1,34
2.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	284 Orang	284 Orang	100	1.830.416.146	1.805.943.186	98,66	1,01
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	39	45,41	116,4	365.400.000	275.280.000	75,34	1,54
3.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	100	269.980.000	227.760.000	84,36	1,18
3.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2 Laporan	2 Laporan	100	45.280.000	9.720.000	21,47	4,6
3.3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100	50.140.000	37.800.000	75,39	1,32
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	112.296	91.347	81,34	1.409.131.591	1.374.381.787	97,53	0,83
4.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100	1.409.131.591	1.374.381.787	97,53	1,02

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, Pada Tahun 2025 terdapat Kegiatan yang tidak memiliki Pagu Anggaran, yaitu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pencapaian kinerja sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sepanjang Tahun 2025 telah memberikan gambaran capaian kinerja, efektivitas penggunaan sumber daya, serta tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Secara umum, Realisasi Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menunjukkan adanya peningkatan pada beberapa indikator strategis, seperti penempatan tenaga kerja, kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola kerja yang layak, dan efektivitas pelayanan publik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain Realisasi Pertumbuhan Retribusi, kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Hal ini menjadi perhatian untuk perbaikan berkelanjutan melalui **penguatan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan inovasi** dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon **berkomitmen** untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) melalui **penguatan tata kelola, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan optimalisasi kolaborasi** dengan pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Dunia Industri, maupun Masyarakat Kota Cilegon. Diharapkan berbagai langkah strategis yang telah dan akan dilakukan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran, serta terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Secara rinci pencapaian sasaran pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur** terdiri dari **empat** Indikator Kinerja yaitu Nilai Lakip Perangkat Daerah dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar **114,63 % (kategori sangat tinggi)**, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar **113,46 % (kategori sangat tinggi)**, Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar **122,7 % (kategori sangat tinggi)** serta Indikator

Pertumbuhan Realisasi Retribusi dengan Realisasi Capaian Kinerja **-452 %** (kategori sangat rendah);

- **Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat** terdiri dari satu indikator kinerja dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar **161,03 %** (kategori sangat tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Secara rinci pencapaian sasaran pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut :

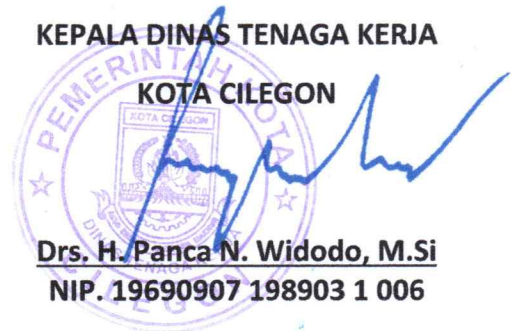
- **Sasaran Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja**, terdiri dari dua Indikator Kinerja yaitu **Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten / Kota** dengan Realisasi Capaian Kinerja sebanyak **120,08 %** (kategori sangat tinggi) dan **Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)** dengan Realisasi Capaian Kinerja sebanyak **55,50 %** (kategori kurang);
- **Sasaran Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional**, dengan Indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** dengan Realisasi Capaian Kinerja sebanyak **81,80 %** (kategori baik).

Pada Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 13.954.354.566** sedangkan Realisasi Anggaran mencapai **Rp. 13.354.084.647** dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2025 serapan anggaran sebesar **95,76 %** dan nilai efisiensi anggaran sebesar **14,24 %**.

Akhirnya kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon serta penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025. Diharapkan Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, serta dasar perbaikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Bidang Ketenagakerjaan pada tahun mendatang.

Cilegon, 26 Januari 2026

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA CILEGON**



Drs. H. Panca N. Widodo, M.Si
NIP. 19690907 198903 1 006



PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS TENAGA KERJA

Jl. Raya Bojonegara Km. 2 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon
Telp. / Fax. : (0254) 5753250 Email : disnaker@cilegon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

NOMOR 060/KEP.044/Sekrt

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON TAHUN 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perlu disusun Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025;
- b. bahwa agar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, dengan susunan sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Tim, di antaranya :
 - a) Mengoordinasikan seluruh tahapan penyusunan Laporan Kinerja;
 - b) Mengendalikan pelaksanaan tugas anggota tim;
 - c) Memastikan kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan;

- d) Melakukan pengendalian mutu;
- e) Memimpin rapat koordinasi dan pembahasan hasil capaian kinerja;
- f) Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil reviu APIP/Inspektorat;
- g) Melaporkan progres dan hasil penyusunan kepada Kepala Dinas.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Tim, di antaranya :

- a) Menghimpun data dan informasi kinerja;
- b) Melakukan verifikasi dan validasi data kinerja;
- c) Menyusun bahan analisis capaian kinerja;
- d) Memberikan dukungan teknis penyusunan laporan;
- e) Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi;

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 30 Oktober 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA CILEGON,**



Drs.H. PANCA N. WIDODO, M.Si
NIP. 19690907 198903 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

NOMOR : 060/KEP.044/Sekrt

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA
KOTA CILEGON TAHUN 2025**

SUSUNAN TIM KERJA

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
- Ketua : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Keuangan
(Lian Febrianti, S.IP, M.Si.)
- Sekretaris : Edi Santoso, S.E
- Anggota :
1. Sekretariat Dinas :
 - a) Asih Dwi Astuti, S.Psi.;
 - b) Oding Ruhiat, S.Ap.;
 - c) Shinta;
 2. Bidang Hubungan Industrial :
 - a) Kepala Bidang Hubungan Industrial (Faruk Oktavian, S.Kom., M.Si.)
 - b) Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda (Mochamad Zharwan, S.E.);
 - c) Penelaah Teknis Kebijakan (Dita Sestiana, S. Psi.);
 3. Bidang Perencanaan Pelatihan Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja :
 - a) Pengantar Kerja Ahli Muda (Wawan Gunawan, SE.);
 - b) Pengantar Kerja Ahli Muda (Aisah, SH.);
 - c) Pengantar Kerja Ahli Muda (Ahmad Taufan Taufani, S.H.);
 - d) Pengantar Kerja Ahli Muda (Chandra Joenoes, S.E.);
 - e) Pengantar Kerja Pratama (Nuurin Izzati, S.Hum.);
 - f) Khairunnisa, S.Sos.;
 - g) Ricky Firdiansyah, S.E.;
 - h) Deni Yuliawan;
 4. UPTD Latihan Kerja :
 - a) Kepala UPTD Latihan Kerja (Irham Hafrizal, S.H.);
 - b) Penelaah Teknis Kebijakan (Pramudya Candra Perkara, ST.);
 - c) Haerul Hakim, S.T.;

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA CILEGON,**


Drs.H. PANCAN WIDODO, M.Si
NIP. 19690907 198903 1 006

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				20.237.020.000		20.416.100.000		20.660.510.000		20.911.380.000		20.911.380.000		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.787.020.000		9.986.100.000		10.199.910.000		10.419.480.000		10.419.480.000		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5	2.913.260.000	3,8	2.942.240.000	4	2.981.200.000	4,5	3.022.020.000	4,5	3.022.020.000	2.07.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS TENAGA KERJA	
	Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	0	60		65		75		85		90			
	Indeks Pelayanan Publik (poin)	3,24	3		3,6		4,2		4,6		5			
	Kinerja pendapatan retribusi kewenangan perangkat daerah (OPD penghasil) (%)	151,49	100		100		100		100		100			
2.07.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.07.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7.092.000		7.092.000		7.447.000		7.447.000		7.447.000		
Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	7.092.000	1	7.092.000	1	7.447.000	1	7.447.000	1	7.447.000		
2.07.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				7.092.000		7.092.000		7.447.000		7.447.000		7.447.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	7.092.000	1	7.092.000	1	7.447.000	1	7.447.000	1	7.447.000		
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				223.030.000		211.510.000		212.520.000		240.870.000		240.870.000		
Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	223.030.000	1	211.510.000	1	212.520.000	1	240.870.000	1	240.870.000		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12					
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		9.500.000		9.500.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	15.000.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		9.500.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.500.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		10.000.000		9.500.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	15.000.000	2	10.000.000	2	9.500.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		9.000.000		9.500.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	1	9.000.000	1	9.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.500.000		9.000.000		9.000.000		9.500.000		9.500.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	9.500.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.500.000	12	9.500.000		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				143.960.000		143.960.000		144.960.000		155.280.000		155.280.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	143.960.000	12	143.960.000	12	144.960.000	12	155.280.000	12	155.280.000		
2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.390.000		5.660.000		5.950.000		6.250.000		6.250.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.390.000	1	5.660.000	1	5.950.000	1	6.250.000	1	6.250.000		
2.07.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4.180.000		4.390.000		4.610.000		4.840.000		4.840.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	4.180.000	1	4.390.000	1	4.610.000	1	4.840.000	1	4.840.000		
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				45.000.000		48.300.000		83.363.511		56.000.000		54.000.000		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	5	45.000.000	5	48.300.000	5	83.363.511	5	56.000.000	5	54.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		0					
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		0		10		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		1.000.000		1.000.000		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	0	1	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	0		
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		31.863.511		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	10	31.863.511	0	0	0	0		
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		47.300.000		49.500.000		54.000.000		54.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	5	45.000.000	5	47.300.000	5	49.500.000	5	54.000.000	5	54.000.000		
2.07.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	0	0		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.220.874.100		2.260.664.100		2.257.045.589		2.277.916.100		2.280.916.100		
Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.220.874.100	12	2.260.664.100	12	2.257.045.589	12	2.277.916.100	12	2.280.916.100		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				438.422.032		483.212.032		479.593.521		500.464.032		503.464.032		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	438.422.032	12	483.212.032	12	479.593.521	12	500.464.032	12	503.464.032		
2.07.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				318.910.000		318.910.000		318.910.000		318.910.000		318.910.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	318.910.000	2	318.910.000	2	318.910.000	2	318.910.000	2	318.910.000		
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.458.542.068		1.458.542.068		1.458.542.068		1.458.542.068		1.458.542.068		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.458.542.068	12	1.458.542.068	12	1.458.542.068	12	1.458.542.068	12	1.458.542.068		
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				261.013.900		254.923.900		255.923.900		269.536.900		268.536.900		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	16	261.013.900	16	254.923.900	16	255.923.900	16	269.536.900	16	268.536.900		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	4		4		4		4		4			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	82	23		23		23		23		23			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	0		1		1		1		1			
2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		1.000.000		1.000.000		0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	0	0	1	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	0		
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				214.263.900		214.263.900		214.263.900		214.263.900		214.263.900		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	16	214.263.900	16	214.263.900	16	214.263.900	16	214.263.900	16	214.263.900		
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.250.000		15.660.000		15.660.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	82	23	21.250.000	23	15.660.000	23	15.660.000	23	25.000.000	23	25.000.000		
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.500.000		25.000.000		25.000.000		29.273.000		29.273.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	4	25.500.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	29.273.000	4	29.273.000		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kinerja pendapatan retribusi kewenangan perangkat daerah (OPD penghasil) (%)	151,49	100	2.913.260.000	100	2.942.240.000	100	2.981.200.000	100	3.022.020.000	100	3.022.020.000	2.07.0.00.0.00.01.00 01 - UPTD Latihan Kerja	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5		3,8		4		4,5		4,5			
	Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	0	60		65		75		85		90			
	Indeks Pelayanan Publik (poin)	3,4	3		3,6		4,2		4,6		5			
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				49.250.000		52.750.000		47.900.000		53.250.000		53.250.000		
Melaksanakan Administrasi Umum UPTD Latihan Kerja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	49.250.000	1	52.750.000	1	47.900.000	1	53.250.000	1	53.250.000		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.300.000		11.300.000		5.450.000		9.800.000		9.800.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	11.300.000	1	11.300.000	1	5.450.000	1	9.800.000	1	9.800.000		
2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.450.000		20.450.000		21.450.000		21.450.000		21.450.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	20.450.000	1	20.450.000	1	21.450.000	1	21.450.000	1	21.450.000		
2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.500.000		11.000.000		11.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	7.500.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000		
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		
Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah (UPTD Latihan Kerja)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	9	27.000.000	9	27.000.000	9	27.000.000	9	27.000.000	9	27.000.000		
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	9	27.000.000	9	27.000.000	9	27.000.000	9	27.000.000	9	27.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (UPTD Latihan Kerja)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	13	70.000.000	13	70.000.000	13	80.000.000	13	80.000.000	13	80.000.000		
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	13	70.000.000	13	70.000.000	13	80.000.000	13	80.000.000	13	80.000.000		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	79,83	80,05	6.873.760.000	80,1	7.043.860.000	80,15	7.218.710.000	80,2	7.397.460.000	80,2	7.397.460.000	2.07.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS TENAGA KERJA	
	Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	0	99,5		99,5		99,5		99,5					
	Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	0	80		85		90		95		100			
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51.055.928		52.676.426		54.834.937		56.576.160		56.576.160		
Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	2	18.953.928	2	20.074.426	2	21.232.937	2	22.374.160	2	22.374.160		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2		2		2		2					
2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.497.928		8.497.928		8.497.928		8.797.928		8.797.928		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	2	8.497.928	2	8.497.928	2	8.497.928	2	8.797.928	2	8.797.928		
2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000		6.120.498		6.120.498		6.420.498		6.420.498		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2	5.000.000	2	6.120.498	2	6.120.498	2	6.420.498	2	6.420.498		
2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2.560.000		2.560.000		3.060.000		3.350.000		3.350.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	2.560.000	1	2.560.000	1	3.060.000	1	3.350.000	1	3.350.000		
2.07.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				2.896.000		2.896.000		3.554.511		3.805.734		3.805.734		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	2.896.000	1	2.896.000	1	3.554.511	1	3.805.734	1	3.805.734		
Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000		
2.07.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000		
2.07.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000		
2.07.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000		
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	24.902.000	3	25.402.000	3	26.402.000	3	27.002.000	3	27.002.000		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.402.000		14.902.000		14.902.000		15.202.000		15.202.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	14.402.000	3	14.902.000	3	14.902.000	3	15.202.000	3	15.202.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.500.000		10.500.000		11.500.000		11.800.000		11.800.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	10.500.000	1	10.500.000	1	11.500.000	1	11.800.000	1	11.800.000		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.801.704.072		6.970.183.574		7.142.875.063		7.319.883.840		7.319.883.840		
Dokumen Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	6.794.060.072	12	6.962.539.574	12	7.135.231.063	12	7.312.239.840	12	7.312.239.840		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	31				31		31		31			
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.739.180.072		6.907.659.574		7.080.351.063		7.257.359.840		7.257.359.840		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	31	6.739.180.072	31	6.907.659.574	31	7.080.351.063	31	7.257.359.840	31	7.257.359.840		
2.07.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				54.880.000		54.880.000		54.880.000		54.880.000		54.880.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	54.880.000	12	54.880.000	12	54.880.000	12	54.880.000	12	54.880.000		
Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	7.644.000	2	7.644.000	2	7.644.000	2	7.644.000	2	7.644.000		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.144.000		2.144.000		2.144.000		2.144.000		2.144.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	2.144.000	2	2.144.000	2	2.144.000	2	2.144.000	2	2.144.000		
2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000		
2.07.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12					
2.07.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000		
2.07.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000		
2.07.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	0	80	6.873.760.000	85	7.043.860.000	90	7.218.710.000	95	7.397.460.000	100	7.397.460.000	2.07.0.00.0.00.01.00 01 - UPTD Latihan Kerja	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	79,83	80,05		80,1		80,15		80,2		80,2			
	Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	0	99,5		99,5		99,5		99,5		99,5			
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentasi ketersediaan dokumen perencanaan tenaga kerja (%)	0	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	2.07.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS TENAGA KERJA	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Penyelenggaraan Forum Industri untuk Kolaborasi Pelatihan, Pemagangan dan Penempatan Tenaga Kerja (Prioritas Daerah)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	0	1	0	1	0	1	50.000.000		
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				50.000.000		0		0		0		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	0	1	0	1	0	1	50.000.000		
Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	0	50.000.000	0	0		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		0		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	0	50.000.000	0	0		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				6.100.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja				0		0		0		0		0	2.07.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS TENAGA KERJA	
	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat (%)	5	5,29		5,88		6,52		7,24		7,24		2.07.0.00.0.00.01.00 01 - UPTD Latihan Kerja	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				6.050.000.000		6.050.000.000		6.050.000.000		6.050.000.000		6.050.000.000		
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	0	2	2.500.000	3	3.000.000	3	3.000.000	4	3.500.000	4	3.500.000		
2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				2.500.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000		
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	0	2	2.500.000	3	3.000.000	3	3.000.000	4	3.500.000	4	3.500.000		
Modernisasi dan Perluasan Fungsi Unit Pelatihan Kerja Berstandar Nasional untuk Masyarakat dan Kemitraan dengan Industri (Prioritas Daerah)	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	0	13	1.920.677.980	13	1.579.000.000	9	1.369.100.000	7	1.135.530.000	7	1.135.530.000		
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				1.920.677.980		1.579.000.000		1.369.100.000		1.135.530.000		1.135.530.000		
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	0	13	1.920.677.980	13	1.579.000.000	9	1.369.100.000	7	1.135.530.000	7	1.135.530.000		
Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja bersertifikasi keahlian dan sesuai kebutuhan industri di Cilegon (Prioritas Daerah)	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	672	586	4.126.822.020	662	4.468.000.000	689	4.677.900.000	723	4.910.970.000	723	4.910.970.000		
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				4.126.822.020		4.468.000.000		4.677.900.000		4.910.970.000		4.910.970.000		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	672	586	4.126.822.020	662	4.468.000.000	689	4.677.900.000	723	4.910.970.000	723	4.910.970.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Melaksanakan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	20	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	20	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	39	43	1.750.000.000	47	1.750.000.000	51	1.750.000.000	55	1.750.000.000	59	1.750.000.000	2.07.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				1.523.500.000		1.503.500.000		1.483.500.000		1.463.500.000		1.443.500.000		
Meningkatkan Pelayanan Antar Kerja Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	300	400	100.000.000	500	100.000.000	500	100.000.000	600	100.000.000	600	100.000.000		
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	300	400	100.000.000	500	100.000.000	500	100.000.000	600	100.000.000	600	100.000.000		
Penyelenggaraan Forum Industri untuk Kolaborasi Pelatihan, Pemagangan dan Penempatan Tenaga Kerja (Prioritas Daerah)	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	100	105	1.423.500.000	110	1.403.500.000	115	1.383.500.000	120	1.363.500.000	125	1.343.500.000		
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.376	2.700		2.900		3.150		3.400		3.650			
	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	0	5		10		15		20		25			
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				1.153.500.000		1.133.500.000		1.113.500.000		1.093.500.000		1.073.500.000		
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.376	2.700	1.153.500.000	2.900	1.133.500.000	3.150	1.113.500.000	3.400	1.093.500.000	3.650	1.073.500.000		
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	0	5	70.000.000	10	70.000.000	15	70.000.000	20	70.000.000	25	70.000.000		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	100	105	200.000.000	110	200.000.000	115	200.000.000	120	200.000.000	125	200.000.000		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				86.500.000		86.500.000		86.500.000		86.500.000		86.500.000		
Meningkatkan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	0	1	86.500.000	1	86.500.000	1	86.500.000	1	86.500.000	1	86.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	6.430	6.500		6.500		6.500		6.500		6.500			
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	30	50		50		50		50		50			
2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	6.430	6.500	31.500.000	6.500	31.500.000	6.500	31.500.000	6.500	31.500.000	6.500	31.500.000		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	30	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				140.000.000		160.000.000		180.000.000		200.000.000		220.000.000		
Meningkatkan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	40	20	140.000.000	20	160.000.000	20	180.000.000	20	200.000.000	20	220.000.000		
	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	110	120		130		140		150		160			
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				80.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	110	120	80.000.000	130	100.000.000	140	120.000.000	150	140.000.000	160	160.000.000		
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	40	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				2.500.000.000		2.530.000.000		2.560.600.000		2.591.900.000		2.591.900.000		
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	65.527	118.942	2.500.000.000	125.824	2.530.000.000	132.952	2.560.600.000	140.332	2.591.900.000	147.972	2.591.900.000	2.07.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS TENAGA KERJA	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	10	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000		
	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	56	56		56		56		56		56			
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	56	56	5.000.000	56	5.000.000	56	5.000.000	56	5.000.000	56	5.000.000		
2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				2.485.000.000		2.515.000.000		2.545.600.000		2.576.900.000		2.576.900.000		
Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	2.485.000.000	1	2.515.000.000	1	2.545.600.000	1	2.576.900.000	1	2.576.900.000		
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	4.650	11.225		11.393		11.545		11.700		11.700			
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	20	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				202.636.000		202.636.000		202.636.000		202.636.000		202.636.000		
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	3	3	202.636.000	3	202.636.000	3	202.636.000	3	202.636.000	3	202.636.000		
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				11.100.000		11.100.000		11.100.000		11.100.000		11.100.000		
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	20	20	11.100.000	20	11.100.000	20	11.100.000	20	11.100.000	20	11.100.000		
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				4.440.000		4.440.000		4.440.000		4.440.000		4.440.000		
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	4.440.000	1	4.440.000	1	4.440.000	1	4.440.000	1	4.440.000		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				2.266.824.000		2.296.824.000		2.327.424.000		2.358.724.000		2.358.724.000		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	4.650	11.225	2.266.824.000	11.393	2.296.824.000	11.545	2.327.424.000	11.700	2.358.724.000	11.700	2.358.724.000		



WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 800.05/Kep.203-Org/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2025-2029

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Kota Cilegon 2025-2029, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cilegon, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025-2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 807);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 127);
14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tahun 2025-2029, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Lampiran I sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Wali Kota.

KETIGA ...

KETIGA : Indikator Kinerja Utama pada Lampiran II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan digunakan sebagai Pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 10 September 2025

WALI KOTA CILEGON,



ROHINSAR

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Daerah Kota Cilegon
3. Yth. Kepala BPKPAD Kota Cilegon
4. Kepala Perangkat Daerah terkait

24. DINAS TENAGA KERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tenaga kerja yang Berdaya Saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Mengacu pada publikasi sakernas Badan Pusat Statistik jumlah pengangguran (usia angkatan kerja tetapi belum bekerja) dibagi jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja) dikali 100%
	Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten /	Persen	Pencari kerja yang Ditempatkan / Pencari kerja yang terdaftar)*100% Pencari kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) baik melalui pelatihan serta yang Dimagangkan dibagi Pencari

		kota		kerja yang terdaftar dikali 100%
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan dikali 100%
	Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.